

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Riset

1. Karakter sebagai identitas elite

Sebagai masyarakat *Tiyombu*, Suwawa telah melalui waktu yang panjang dalam pembentukan masyarakatnya. Fase kerajaan, penjajahan hingga kemerdekaan dilalui dengan segala dinamika pahit manisnya keadaan kala itu. Dalam banyak hal, orang akan berpendapat bahwa waktu dapat merubah segalanya. Apa yang ada kemarin belum tentu akan sama adanya dengan hari ini—kecuali untuk hal-hal yang *sunatullah*. Sayangnya Suwawa tidak demikian adanya. Boleh jadi terjadi perubahan gerak penduduk, wilayah administratif, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Namun ada hal penting yang tidak berubah dalam pandangan kolektif masyarakat Suwawa. ‘Karakter’, itulah yang tetap bertahan ditengah bayang-bayang zaman yang ‘dikomandani’ oleh modernisasi.

Erat kaitannya dengan elite Suwawa, karakter menjadi simbol yang perlu diperhitungkan dalam legitimasi ke-elitan. Secara sempit, kita dapat mendefinisikan elite Suwawa adalah mereka yang mampu memainkan ‘karakter Suwawa’. Keras, patriotis, berani, begitulah orang mendefinisikan karakter dari masyarakat Suwawa, lebih khusus terhadap karakter kepemimpinan Suwawa. Akan

sangat disayangkan jika seseorang yang berinisiatif menjadi tokoh lokal Suwawa namun tidak memiliki kriteria-kriteria sensitif tersebut. Masyarakat Suwawa akan merasa ‘geli’ jika melihat pemimpinnya tidak mampu mencerminkan karakter pemimpin yang mereka dambakan. Hal tersebut disebabkan oleh kenangan masa lalu Suwawa yang syarat dengan pemimpin dengan ketentuan yang demikian. Menurut Alim S. Niode “.... Sebagai kerajaan, disana juga mempunyai struktur. Dan komposisi struktur itu diisi dengan orang-orang yang berani, memiliki ilmu kanuragan dsb. Kalau di Jawa disebut Patih, disana disebut *Talenga—Pogambango* salah satunya”. Alim juga menambahkan bahwa kepemimpinan di Suwawa juga dibarengi dengan karakter herois dan mampu menjadi inisiator dalam keadaan genting. Peristiwa yang dianggap genting pada waktu itu memang harus dihadapi secara fisik, mereka para pemimpin Suwawa dibekali dengan keterampilan menghadapi kegentingan tersebut.¹ Pada masa kolonialisme Belanda juga terdapat raja-raja yang berani menentang keinginan Belanda—misalnya Arusbone (Wartabone) dan Tagango (Tangahu), walaupun pada waktu itu Belanda adalah ‘klan’ berpengaruh di Gorontalo. Tidak mengherankan jika Sugondo Makmur mengasumsikan Suwawa merupakan wilayah yang berpotensi heroik. Hal tersebut menurut Sugondo dipicu oleh karakter masyarakatnya yang keras, terbuka dan tidak mau kompromi. Bahkan menurutnya, masyarakat Suwawa cenderung merupakan masyarakat yang figuristik ketimbang idealistik.²

¹ Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 19 Maret 2013.

² Dituturkan oleh Sugondo Makmur melalui wawancara pada 11 April 2013.

Adanya karakter yang berani, keras membuat orang berpikir akan sangat sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat Suwawa apalagi bila harus menjadi pemimpin di Suwawa. Secara ekstrem dan berimbang, Moh. Aldes Ilahude mengatakan bahwa:

.... Sifat khusus orang Suwawa itu tidak mau dijajah, tidak mau diperintah. Sangat menghormati, tapi tidak mau diperintah. Dan itu sampai sekarang masih ada. Itu karakter umumnya masyarakat Suwawa itu. Kemudian akan jelas orang Suwawa, dia mampu mengayomi. Orang Suwawa itu bukan ‘pencari hal’, tapi setiap permasalahan-permasalahan yang ada, hadirnya orang Suwawa justru aman itu. Dan itu sampai sekarang begitu. Ketika kita orang asing, mau kesana justru aman.³

Argumen Aldes bukanlah suatu stereotip ‘barbarisme’ masyarakat Suwawa. Justru apa yang menjadi penekanan Aldes adalah tidak sembarangnya menjadi pemimpin di Suwawa. Paradoksnya, masyarakat Suwawa adalah masyarakat yang terbuka dalam ketertutupannya. Mereka sangat menghormati siapa saja asalkan yang bersangkutan tidak mencemari nilai-nilai lokal Suwawa. Barangkali asumsi empiris akan hal tersebut dapat didalami dari pengalaman pribadi Safri Puili yang merupakan camat Suwawa pada periode 2006-2011. Apa yang membuat takjub adalah Safri bukanlah putra asli Suwawa, dia merupakan keturunan Makasar yang secara kebetulan menikah dengan orang Suwawa. Berikut ini merupakan hal penting yang menjadi ‘nostalgia’ Safri ketika memimpin Suwawa sekaligus instrumen yang ampuh dalam membedah karakteristik masyarakat Suwawa secara lebih spesifik.

³ Diturunkan oleh Moh. Aldes Ilahude melalui wawancara pada 24 April 2013.

.... Suwawa itu halus sebetulnya, orang ramah sebetulnya, cuma asal jangan disakiti. Saya *aja*, awal masuk disitu saya kira seperti apa. Begitu saya masuk, ternyata mereka patuh. Saya kira saya orang luar, saya masuk kesana, saya harus dipercayakan memimpin Suwawa. Ternyata mereka akan menjadi ramah kalau kita ramah, bahkan sangat ramah. Saya dengan elite-elite politik itu, saya dengan orang tua mereka dan tokoh-tokoh yang ditokohkan, saya terasa pada saat saya membangun masjid. Saya kumpul *aja*, termasuk Pak Haris Nadjamudin (Alm.), dari semua tokoh-tokoh mereka datang. Posisi saya masih umur berapa pada saat itu jadi camat.⁴

Menjadi elite di Suwawa tidak hanya berbekal karakter dasar—keberanian, terbuka dan patriotis—pemimpin Suwawa. Mereka juga memiliki karakter lainnya yang bisa jadi adalah sumber daya politik elite. Aktualisasi diri dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dalam membentuk legitimasi masyarakat terhadap elite di Suwawa. Elite, selain pertimbangan adanya ‘jiwa yang kuat’, juga harus dibarengi dengan kepekaan moral yang tinggi. Taufik Sidiki mengatakan bahwa di Suwawa yang disebut elite haruslah mempunyai rasa saling menghargai, tidak sombong, mampu mengayomi bahkan haruslah jauh dari tindakan korupsi.⁵ Hal tersebut dalam perspektif Alim disebabkan oleh ketentuan elitisme yang sudah terbangun sejak dulu. Menurutnya, “... Dulu itu elitisme dilihat dengan *popoli* (akhlak), bagaimana orang menata akhlaknya dan orang yang sopan santun, *punya* adab, tata tertib, itu tanda bangsawan⁶ (*u bangusa*). Jadi *u bangusa yito, to popoli* (Indonesia: kebangsawanan itu ada pada akhlak).⁷ Jadi elite—formal maupun non formal—di Suwawa adalah mereka yang merepresentasikan keberanian, patriotisme serta dibarengi dengan rasa kepekaan sosial

⁴ Dituturkan oleh Safri Puili melalui wawancara pada 9 April 2013.

⁵ Dituturkan oleh Taufik Sidiki melalui wawancara pada 13 April 2013.

⁶ ‘Bangsawan’ yang dimaksudkan Alim bukanlah justifikasi terhadap adanya kalangan tertentu yang merupakan kaum aristokrat di Suwawa. Kebangsawanan yang dimaksud Alim lebih mengarah ke kepemimpinan dan siapa saja yang bisa menjadi tokoh lokal di Suwawa.

⁷ Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 19 Maret 2013.

melalui akhlak kepemimpinan. Walaupun memiliki keberanian dan jiwa patriotis, tapi secara moral dianggap menyimpang, maka status elite bisa saja bukan merupakan suatu sifat ‘kewibawaan’ tetapi hanya sebatas rasa segan yang cenderung intimidatif.

2. *Tuwawa*: solidaritas sosial

Misi utama menjaga identitas lokal yang diprakarsai oleh Putri Peedaa hingga kini masih dapat dinikmati hasilnya. Upaya kultural menciptakan komposisi masyarakat yang homogen berhasil membentuk komunalisme lokal yang anti perpecahan. *Tuwawa* tidak hanya menjadi etimologi dari kata Suwawa yang saat ini terus menggema dalam ucapan dan ingatan orang Suwawa. Lebih dari itu, *Tuwawa* yang merupakan serapan dari kata *Towawa’a* yang bermakna ‘satu tubuh’ telah menjadi filosofi persaudaraan yang telah mengakar di masyarakat Suwawa. Semangat integritas itulah yang kemudian melahirkan motivasi anti penjajahan dan loyalitas yang besar terhadap NKRI. Secara ekstrem, Safri menganalogikan solidaritas masyarakat Suwawa dengan diktum “*Kore* (Indonesia: Sentuh) di Bube, Pinogu seperti kena. Dicubit di kaki, rasanya sampai di kepa-la”.⁸ Tidak mengherankan jika Nani Wartabone (mungkin?) tidak kesulitan dalam mewujudkan niatnya mengusir Belanda dan ‘mob’ Permesta.

Rasa persaudaraan yang tinggi juga ‘memberanguskan’ sikap saling mendominasi antar masyarakat bahkan antar elite Suwawa. Di masa kolonialisme, Belanda yang menjalankan politik disintegrasi sistem sosial mendapat penolakan

⁸ Diturunkan oleh Safri Puili melalui wawancara pada 9 April 2013.

secara tidak langsung dari masyarakat Suwawa. Sebagian masyarakat Suwawa memilih berstatus *Polahi* ketimbang harus bentrok sesama keluarga, apalagi hanya karena jabatan yang dipropagandai oleh Belanda.⁹ Hingga saat ini di kalangan elite Suwawa saling menghargai satu sama lain, meskipun berada pada strata jabatan dan arena yang berbeda—bahkan dengan marga yang berbeda. Seperti apa yang dikemukakan oleh Taufik, bahwa:

Karakteristik itu, walaupun saya marga Sidiki, ada juga marga Wartabone, ada Tangahu, ada Ilahude. Tapi pada dasarnya kita saling menghormati, saling menghargai. Tidak pernah pam-pam besar ini saling hantam-hantaman.

Alhamdulillah sampai sekarang kita saling menghargai. Siapapun yang berminat, siapapun yang berkompetensi disitu dan siapa yang diangkat disitu, ya silakan-silakan saja, terbuka.¹⁰

Meski elite formal dan non formal bergerak dalam arena yang berbeda, tetapi mereka tetap menjalin relasi satu sama lain. Persatuan antara elite formal dan elite non formal secara eksplisit dapat disaksikan pada setiap hajatan maupun upacara-upacara resmi di Suwawa. Aldes menggambarkan hal tersebut sbb:

Terkadang ada acara-acara tertentu hadirnya para birokrat-birokrat ini. Tetapi didalam membangun, ada yang dikenal dengan “*Buwatulo Towu Loongo*”. Itu *Buwatulo Birokrati*, dalam hal ini pemerintahan, ada *Buwatulo Adati* itu yang mengatur semua dan ada *Buwatulo Syara*’. Ini tiga komponen ini alhamdulillah masih tetap padu, dalam hal ini pihak birokrasi selalu memfasilitasi seluruh gerakan yang ada baik itu pergerakan secara adat maupun agama. Dan memang saling ada keterkaitan satu diantara yang lain. Dan itu yang masih menonjol disana, dibanding dengan daerah-daerah lain.¹¹

⁹ Dituturkan oleh Jumadi Botutihe melalui wawancara pada 15 April 2013.

¹⁰ Dituturkan oleh Taufik Sidiki melalui wawancara pada 13 April 2013.

¹¹ Dituturkan oleh Moh. Aldes Ilahude melalui wawancara pada 24 April 2013.

Istilah “*Buwatulo Towu Loongo*” memang bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo secara turun temurun. Apalagi di Suwawa yang merupakan golongan *Tiyombu*, tidak mungkin mengesampingkan sektor informal khususnya adat dalam menjalankan roda kemasyarakatan. Hingga kini keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Walaupun *Buwatulo Adati* dan *Buwatulo Syara’* dalam perkembangan zaman kian merosot perwujudannya dalam masyarakat.

Karakter masyarakat Suwawa yang berani dan keras juga banyak mengelabui persepsi kebanyakan orang yang tidak memahami kultur sosial Suwawa. Masyarakat dengan karakter yang keras dan berani memang sangat potensial akan letupan konflik. Namun di Suwawa justru sikap keras dan berani menjadi identitas yang mengakrabkan hubungan emosional kekeluargaan masyarakatnya. Sehingga nyaris tak ada konflik yang kronis di internal Suwawa pasca Pulumoduyo vs Mooduto berabad-abad silam.

Dalam konteks berpolitik juga demikian. Politik yang banyak berorientasi pada kekuasaan dan sikap menghalalkan segala cara adalah ancaman terbesar integritas masyarakat. Partai Politik yang merupakan kendaraan paling ampuh dalam memperoleh kekuasaan juga tak bisa dihindari oleh masyarakat Suwawa dengan adanya sistem pemerintahan modern. Bahkan jika di masa Nani Wartabone PNI memonopoli gerakan legitimasi politik masyarakat, maka saat ini banyak partai politik yang bertengger memantau dinamika politik lokal Suwawa.

Elite Suwawa juga tidak monoton pada satu partai politik saja, mereka tersebar berdasarkan pilihan dan minat politik. Mereka berkompetisi berdasarkan bendera masing-masing partainya. Yang anehnya hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik terbuka antara elite Suwawa dengan partai politik yang berbeda, begitu juga dengan massa pendukung masing-masing partai politik. Hal ini menurut Alim disebabkan oleh adanya paradigma *cross cutting affiliation* (afiliasi ganda) yang dianut masyarakat Suwawa. Selain menempatkan kepentingan mereka di partai politik, para elite Suwawa juga tetap mengedepankan persaudaraan diantara mereka.¹² Mereka terlihat sengit dalam beradu argumen secara politik, namun begitu kembali ke lingkungan sosial, mereka tetap menjalin silaturahmi kekeluargaan yang harmonis. Dalam politik sendiri memang merupakan hal yang normatif apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memperoleh dukungan massa. Sehingga, dikonfirmasi mengenai konflik di Suwawa, Hamim Pou mengatakan bahwa “Ini yang menarik di Bone Bolango-Suwawa itu, konfliknya itu lebih pada aspek oral. Jadi *nggak* sampai pukul-pukulan, konflik fisik. Tetapi lebih pada aspek kata-kata, kalimat, sikap ...”.¹³

3. Eksistensi elite: dari bangsawan ke heroisme

Sub topik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal secara umum dan sederhana mengenai cikal bakal fenomena elitisme di Suwawa, khususnya mengenai hadirnya marga-marga ‘terpandang’ di Suwawa. Tentu kita juga akan membicarakan beberapa fase yang menjadi ‘sumbu’ pemicu elitisme di Suwawa

¹² Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 19 Maret 2013.

¹³ Dituturkan oleh Hamim Pou melalui wawancara pada 26 April 2013.

bisa ‘menyala’ begitu terang hingga banyak menyilaukan kalangan-kalangan tertentu. Sebenarnya agak sulit menentukan kisaran tahun yang pasti mengenai pola-pola elitisme yang berdampak pada masa sekarang. Hal tersebut karena elitisme di Suwawa tidak distimulus oleh suatu kebijakan ataupun produk keputusan kolektif yang memiliki kepastian tanggal mulai diberlakukan. Elitisme di Suwawa lahir melalui ragam peristiwa yang saling terkait satu sama lain. Setiap peristiwa memberikan ‘embrio’ elitisme kepada peristiwa yang lain. Para aktornya juga terus direproduksi turun temurun secara primordial dan cenderung feodalistik.

Membandingkan antara Tabel 4.11 dan Tabel 4.1 sebelumnya, terdapat beberapa komposisi nama (marga) yang sama—Wartabone dan Tangahu. Bisa dipastikan bahwa mereka adalah keturunan raja yang pernah memerintah di Suwawa yang mungkin juga pada saat ini memperoleh legitimasi dari masyarakat Suwawa. Spesial untuk ‘Wartabone’, juga tidak mungkin dipisahkan dari peristiwa 23 Januari 1942 dan Permesta 1957-1958. Dari sampel ini kita bisa membangun asumsi bahwa masa kerajaan dan masa perjuangan kemerdekaan adalah dua hal penting yang menjadi konstruksi elitisme di Suwawa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada pendapat yang diungkapkan oleh Jumadi mengenai karakteristik elitisme Suwawa berikut ini:

Karena dia sebagai figur seorang pemimpin, yang mungkin terbawa dari masa kerajaan sampai dengan sekarang. Tapi ada lagi yang melalui jarum politik, baik dari kolonialisme maupun sesudah itu. Tapi orang seperti itu kurang. Jenjangnya kesana, itu pendekatan kepada elite-elite bawaan, keturunan.¹⁴

¹⁴ Dituturkan oleh Jumadi Botutihe melalui wawancara pada 15 April 2013.

Umumnya, setiap kerajaan diperintah oleh raja yang merupakan keturunan secara murni oleh raja sebelumnya. Namun dalam sistem pemerintahan Kerajaan Suwawa, 'keturunan' tidak menjadi prioritas yang menjamin seseorang dapat menjadi raja. Kerajaan Suwawa sejak awal telah merintis sistem demokrasi—parlementer— dalam menentukan setiap raja/ pemimpin. Raja dipilih melalui seleksi yang ketat terutama pada aspek karakter dan akhlak oleh orang-orang yang dianggap 'bijak' di Kerajaan Suwawa (Kerajaan Gorontalo: *Baate*). Sehingga raja Suwawa—dari Ayudugiya hingga Tangahu—tidak identik dengan satu nama, seperti pada aristokrasi Yogyakarta yang memunculkan klan Hamengkubuwono sebagai klan berpengaruh dalam pemerintahan Yogya.

Di Suwawa, meski sistem kerajaan sudah tidak berlaku lagi, tetapi 'hawanya' hingga saat ini masih cukup terasa dalam kehidupan masyarakatnya. Secara kolot, kita dapat menyebut adanya kaum 'bangsawan semu' di Suwawa walaupun komposisi keseluruhan masyarakatnya adalah satu ikatan keluarga yang besar (*Towawa'a*). Mereka secara mendasar adalah produk Kerajaan Suwawa di masa lalu yang telah membentuk jaringan elite yang kokoh. Moh. Kilat Wartabone menegaskan bahwa Kerajaan Suwawa banyak menyumbang tokoh-tokoh Suwawa yang berpengaruh. Namun Kilat juga tidak memungkiri bahwa "... Harus diketahui bahwa orang Suwawa itu turunan raja semua, sampai sekarang sebetulnya begitu. Mengapa dia jadi turunan raja semua? Karena semua marga ini

memerintah, semua terpilih, pernah terpilih jadi raja. Jadi turunannya sekarang ini sebenarnya turunan raja”.¹⁵

Demokrasi parlementer yang diberlakukan Kerajaan Suwawa sebenarnya sepintas telah mencegah dominasi dan monopoli kekuasaan oleh golongan tertentu. Namun disadari atau tidak, sistem ini juga telah membuka ruang dimensi kekuasaan lewat bergamnya marga-marga ‘pujaan’. Apalagi pada masa kolonialisme Belanda, mereka yang potensial sebagai kalangan pemerintah kerajaan diserap dan diberi jabatan pada pemerintahan Belanda. Tetapi, sebagian lainnya ada yang beroponen terhadap Belanda, mereka lebih memilih menentang walaupun dengan tantangan yang besar. Sehingga, elite Suwawa di masa kolonialisme Belanda terbagi menjadi 2 kutub yakni elite pengikut dan elite penentang. Dikemudian hari, perbedaan pilihan itu menjadi tidak nampak lagi. Semuanya dipersatukan sebagai elite yang tidak menginginkan hadirnya Belanda di Gorontalo khususnya di Suwawa.

Nani Wartabone yang ‘diberkati’ sebagai tokoh sentral dalam perjuangan 23 Januari dan Permesta, tidak hanya menjadi simbol kepahlawanan Gorontalo. Menurut Alex Koniyo, bagi masyarakat Suwawa perjuangan 23 Januari 1942 yang dikomandani Nani Wartabone adalah sebuah refleksi akan karakter masyarakat dan Kerajaan Suwawa yang tidak mau dijajah.¹⁶ Lebih luas, menurut Alim perjuangan 23 Januari menegaskan adanya lingkaran elite yang berpengaruh di

¹⁵ Dituturkan oleh Moh. Kilat Wartabone melalui wawancara pada 29 April 2013

¹⁶ Dituturkan oleh Alex Koniyo melalui wawancara pada 27 Maret 2013.

Suwawa.¹⁷ Sinkronitas antara masa kerajaan dan masa perjuangan 23 Januari sebagai konstruksi elite di Suwawa dapat disimak dari pernyataan Rusliyanto Monoarfa berikut ini.

Memang kalau saya, dua hal yang paling menonjol kenapa kemudian Suwawa ini secara figuritas itu lebih menonjol yang pertama adalah karena kesejarahan. Kesejarahan bahwa Suwawa itu adalah *Tiyombu* dari seluruh yang ada di Profinsi Gorontalo. Yang kedua adalah peran-peran strategis didalam rangka melakukan kompromi untuk pembebasan dari penjajahan itu lebih banyak dikendalikan oleh Suwawa yakni Nani Wartabone ...¹⁸

Pada peristiwa Permesta sendiri, Hamim berpendapat bahwa “kelihatannya pengaruh elite-elite dari dulu itu, itu yang memberi pengaruh besar terhadap perlawanan ketika Permesta. Tetap juga dulu 23 Januari Pak Nani, Permesta juga yang melawan itu Pak Nani dengan Pasukan Rimbanya”. Dengan berbagai peristiwa yang banyak membicarakan Suwawa, kemudian berimbas terhadap munculnya “budaya mengenang” dikalangan masyarakat Suwawa. masyarakat Suwawa menjadi sangat respek terhadap golongan tertentu yang dianggap merupakan keturunan dari mereka yang pernah memerintah di Suwawa serta kepada turunan para ‘gladiator’ perjuangan kemerdekaan. Apalagi bila para keturunannya yang ada saat ini memiliki karakter dan akhlak yang relatif sama dengan buyutnya.¹⁹

¹⁷ Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 19 Maret 2013.

¹⁸ Dituturkan oleh Rusliyanto Monoarfa melalui wawancara pada 16 April 2013.

¹⁹ Dituturkan oleh Hamim Pou melalui wawancara pada 26 April 2013.

4. Hegemoni identitas ekonomi dan pendidikan

Bagaimana mengidentifikasi modernnya suatu daerah? Seorang remaja hedonis menjawab dengan pertimbangan ketersediaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya tempat-tempat *me-refresh* kepenatan aktivitas. Lain lagi dengan orang-orang setengah baya yang lebih melihat dari sisi pergolakan moralitas masyarakat yang kian memiriskan. Tidak ada yang salah dengan pendapat yang dikemukakan oleh dua eksponen tadi. Di sudut dunia manapun, modernitas selalu dibarengi dengan kemajuan infrastruktur dan kecamuk moralitas. Tetapi, dua indikator berbeda tentang modernisasi yang dikemukakan oleh kedua eksponen tadi sama halnya dengan pendapat bocah lugu yang mengatakan “buah rambutan itu berserabut dan merah”. Maksudnya, selalu terdapat hal yang lebih penting dalam dalam setiap bentuk yang ada. Modernisasi bukan hanya soal infrastruktur dan moral, tetapi ada hal yang dianggap mendasari peristiwa tersebut. Tanpa bermaksud ‘mengebiri’ indikator penting modernisasi lainnya, nampaknya yang paling menonjol adalah faktor ekonomi dan pendidikan.

Suwawa saat ini, agaknya sudah bisa dikatakan mulai ‘bersenggama’ dengan modernitas. Walaupun kondisi yang demikian hanya begitu nampak di Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Suwawa Tengah. Sarana pendidikan yang memadai dan sektor ekonomi yang prospektif menciptakan keadaan yang berbeda dibanding beberapa dekade sebelumnya. Faktor ekonomi bisa mempengaruhi pendidikan, sedangkan faktor pendidikan bisa memberikan harapan kedudukan dan jaminan ekonomi yang memadai. Siklus yang demikian tengah berlangsung di Suwawa dan bisa saja merong-rong kontur elitisme yang telah mapan.

Elitisme Suwawa mulai dipengaruhi oleh irama modernitas yang tak mungkin bisa terelakan dari kehidupan bermasyarakat. Faktor ekonomi dan pendidikan menjadi basis baru yang mulai diperhitungkan dalam melegitimasi status elite. Marga *beken* tidak lagi menjadi satu-satunya instrumen yang melegitimasi seseorang menjadi elite di Suwawa. Masyarakat Suwawa mulai menunjukkan ketertarikan mereka terhadap unsur ekonomi dan pendidikan sebagai penyokong status elite. Karena memang saat ini—terutama dalam birokrasi modern—pendidikan formal menjadi pra syarat memperoleh kesempatan menduduki jabatan tertentu. Sedangkan ekonomi yang mapan dapat membuka ruang partisipasi seseorang dalam masyarakat. Safri menyebutkan bahwa pertimbangan ekonomi telah merubah pola legitimasi masyarakat. Apalagi dengan adanya Tambang Rakyat yang telah menghadirkan tokoh-tokoh baru dengan *branding* ekonomi sebagai atribut pengenal dalam masyarakat.²⁰ Para tokoh baru tersebut kemudian mulai mengaktualkan diri dengan menggunakan instrumen partai politik yang beragam.

Contoh yang bisa disaksikan mengenai perubahan paradigma masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi dan status pendidikan dapat dilihat pada pelaksanaan adat. Harmain Mansur mengatakan bahwa:

Sudah tidak. Dulu ada itu, kalau masih beberapa puluh tahun. Adat masih kelompok-kelompok yang harus ditampilkan. Sekarang *so* tidak, bahkan ada turunan dari raja-raja tidak diadatkan. Karena tidak mampu membiayai kan. Siapapun dia biar bukan orang yang harus kena adat, tapi kalau dia punya uang, dia bisa membiayai itu pelaksanaan adat, nah dia laksanakan. Sekarang seperti itu.

²⁰ Dituturkan oleh Safri Puili melalui wawancara pada 9 April 2013.

Ya, kalau menurut saya seperti itu. Karena sekarang, saya lihat itu, pelaksanaan itu sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan kalau dulu masih tahun '70-an masih ada batas. Bahkan *mo pake Tingohu* itu cuma batas sini, ada yang berpendapat seperti itu, tidak boleh lewat. Itu kalau orang meninggal dia *mo pake* itu bunyi-bunyian itu, *ma delo rabana he ndayango liyo buti*. Tapi sekarang kan semua dimana saja kalau memang dia bisa melaksanakan, artinya *mo po Pohutu*. Kalau dia mampu (ada uang), keluarganya ada uang, dia *beken Pohutu*. Jadi dia diperlakukan sama dengan turunan raja, padahal dia bukan turunan kerajaan. Tapi dia pantas atau bisa dilakukan secara adat. Karena masing-masing penyelenggara itu juga perlu biaya kan?²¹

Adat yang awalnya sangat ortodoks dengan segala aktivitasnya, kini mulai adaptatif dan fleksibel. Intervensi keamanan ekonomi adalah yang paling dominan mengubah karakter ortodoks dari adat. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi diatas rata-rata, walaupun bukan merupakan sesuatu yang dekat dengan 'darah biru', bisa melaksanakan prosesi adat layaknya 'bangsawan'. Bahkan tradisi *To'opu* kepada setiap pemimpin tidak lagi berorientasi ke orangnya, tapi lebih kepada jabatan yang diembannya.

Kini, mulai terdapat akulturasi legitimasi yang dianut oleh masyarakat Suwawa. Tanpa mengesampingkan aspek figuritas, masyarakat mulai memadukan faktor ekonomi dan pendidikan dalam arena percaturan elite. Dengan munculnya basis-basis baru juga bisa memicu munculnya elite-elite baru baik dari dalam Suwawa maupun dari luar Suwawa. Merupakan suatu keuntungan apabila elite selain memiliki 'elegansi' marga juga memiliki ekonomi yang menjamin serta pendidikan yang diakui secara formal. Elite akan memperoleh banyak kesempatan dalam menciptakan legitimasi masyarakat.

²¹ Dituturkan oleh Harmain Mansur melalui wawancara pada 10 April 2013.

5. Media elite

Sampai dengan hari ini kiranya keseluruhan penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi mengenal raut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tinggi, besar dan agak *calm* barangkali merupakan pendapat umum orang-orang bila ditanyakan bagaimana ciri-ciri sang presiden. Namun cobalah kita tanyakan satu hal kepada orang-orang tersebut: “pernahkah bertemu dengan SBY?”, atau bila lebih tegasnya: “pernah melihat langsung sosok SBY?”. Tentu sebagian dari mereka ada yang menjawab “Ya” dan ada pula yang menjawab “Tidak”. Dua pertanyaan tersebut kemudian akan menjadi sangat primitif apabila apabila orang-orang tersebut mengatakan pernah melihat SBY di TV, koran ataupun majalah. Hal itu menjadi jawaban yang logis dan empiris di zaman yang ‘katanya’ sudah modernis ini. Tanpa mendatangi langsung istana negara, kita bisa melihat sosok SBY yang ‘*nongol*’ di TV sambil berpidato dengan penuh wibawa.

Jika bagi elite nasional seperti SBY menggunakan TV, koran dan majalah sebagai media sosialisasi dan ‘berkenalan’ dengan rakyatnya, maka untuk skala lokal seperti di Suwawa, adat dan partai politik menjadi media ‘*makcomblang*’ anantara elite dan masyarakat. Dari sisi adat, biasanya terlihat pada setiap momentum hajatan resmi maupun tidak resmi (pernikahan maupun kegiatan daerah seperti pelantikan). Akan sangat istimewa apabila seseorang merupakan keturunan raja. Kata Alim, adat memperlakukan mereka secara berbeda dengan yang

lainnya.²² Memasuki era yang cenderung modern saat ini, mengenai adat Suwawa

Kilat mengakui bahwa:

Justru ada, dan memang adat Suwawa seperti itu. Adat Suwawa itu, dia disamping formalnya dia sebagai pemerintah, dia disematkan adat. Dan ketika dia keluar dari jabatan itu, yang melekat masih adat, karena istilah di *To'opu* (pelantikan adat). Ada yang diberi gelar, ada yang dijemput dengan adat.²³

Saat ini adat sebagai media sosialisasi elite telah mengalami transformasi dalam hal orientasi penghargaan. Baiknya hal tersebut dapat disimak dari argumen yang disampaikan oleh Aldes berikut ini.

Iya, kedudukan itu juga penentu. Camatnya misalnya, dia bukan keturunan disitu. Nah, yang dihormati itu bukan dianya, camatnya itu. Dalam bahasa adat *Wuleya lo Lipu* (pemuka wilayah). Dan kembali lagi, yang merubah itu kondisi yang ada sekarang adalah pendidikan. Terkadang, ...banyak orang-orang kalau kita tengok sejarah ada istilah di Gorontalo itu dulu, karena masih kerajaan, "kita punya orang dia", artinya pesuruh. Nah, keturunan yang pesuruh ini berkembang-berkembang lahirnya orang-orang yang mau sekolah tinggi-tinggi, akhirnya dia dengan gelar kesarjanaannya misalnya, kemudian dia jadi pemimpin. Dan itu sangat sulit dilihat dari kaca mata adat. Sehingga adat itu benar-benar ada kehati-hatian di dalam menempatkan kedudukan adat, jangan sampai terkesan dengan orangnya itu. Tidak boleh terkesan dengan orangnya, yang kesan kita itu adalah jabatannya. Karena ada istilah itu tidak pantas, ada orang-orang tertentu yang tidak boleh kita gunakan adat seutuhnya, karena ada imbasnya yang disebut *Puulo* (musibah). Sama juga dengan *Bito, o dungga lo Bito* (mendapat musibah). Sehingga itu dalam adat yang lima tadi, ada disebut *Tinepo Tombula'o*. *Tinepo* itu dia tau siapa yang datang, "*otaawamu ta na'o-na'o mayi buti?*" ("kamu tahu siap yang datang ini?") "*Sapa dia?*". Maka timbul *Tombula'o*, *Tombula'o* itu penghargaan. Sehingga kalau camat itu sudah menjadi adat itu bahwa dia ketua adat yang ada di wilayah itu, yang dengan bahasa disebut *Wuleya lo Lipu*. *Wuleya* ini kalau dulu itu memang teliti sekali, yang pertama dilihat itu keturunan, tidak sembarang. Cuma sekarang, makanya saya sampaikan tadi, perubahan-perubahan yang ada yaitu dari pendidikan. Orang sudah sekolah tinggi-tinggi, STPDN dan keluar kan misalnya disini pengalaman kerjanya jadi lurah dulu. Nah, ini orang dalam kedudukan adat (*Tawu Da'a*), *Ta po Uda'aalo*.

²² Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 19 Maret 2013.

²³ Dituturkan oleh Moh. Kilat Wartabone melalui wawancara pada 29 April 2013

... Dan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Karim Pateda itu akan nampak. Mempengaruhi faktor keturunan orang, itu *o dungga lo bito*. Karena ini dibarengi dengan sumpah adat, sakral sekali, makanya dia ada hubungan dengan syariat itu. Sehingga ketika orang diangkat menjadi *Wuleya lo Lipu* atau jadi pembesar *lo Lipu*, dan latar belakang keluarga ini memang tidak memungkinkan untuk adat. Maka yang terkesan ke kita dalam adat itu adalah kedudukannya, tidak boleh ke orangnya. “*Wanu mo milohe tawu liyo, uwito o dungga lo bito tiyo*” (kalau berorientasi ke ‘orangnya’, akan mendapat musibah)

.... Khusus bagi mereka-mereka penguasa ini, itu tinggal diadatkan dalam hanya bentuk nasehat-nasehat saja, itu di istilahkan *To’opu*. “*Ma Wuleya lo Lipu ito?*” Itu kan peringatan. Kemudian itu dinasehati “*Huta, huta lo ito Eeya; Taluhu, taluhu lo ito Eeya; Dupoto, dupoto lo ito Eeya, tulu, tulu lo ito Eeya, bo diya po luliya to hilawo eeyamu*” (tanah adalah kepunyaan tuanku; air adalah kepunyaan tuanku; angin adalah kepunyaan tuanku; api adalah kepunyaan tuanku; tetapi jangan diperlakukan sewenang-wenang)^{24 25}.

Jadi, para elite khususnya mereka yang memiliki jabatan formal dalam pemerintahan juga kerap mendapat gelar adat (*To’opu*) dari lembaga adat yang ada. Apalagi dalam setiap acara pernikahan, biasanya terdapat ruang kecil yang disebut *Bulita* yang hanya bisa ditempati oleh mereka para pejabat formal maupun non formal. Memang terkesan agak diskriminatif, namun hal ini kemudian turunturun dianggap suatu hal yang ideal dalam setiap hajatan pernikahan maupun kematian. Oleh Sugondo, praktek yang demikian disebut sebagai warisan budaya masa kolonialisme. Adat menurut Sugondo telah ‘terkontaminasi’ karakter Belanda dengan adanya budaya ‘memihak’ dan ‘mendewakan’ mereka yang memiliki jabatan.²⁶ Jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, Harmain mengatakan bahwa:

²⁴ Mengenai sajak nasehat (*Tujaqi*) tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam Alim S. Niode, *Gorontalo: perubahan nilai-nilai budaya dan pranata sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press, 2007, hlm. 115-116.

²⁵ Dituturkan oleh Moh. Aldes Ilahude melalui wawancara pada 24 April 2013.

²⁶ Dituturkan oleh Sugondo Makmur melalui wawancara pada 11 April 2013.

Kalau melihat seperti dulu itu tidak juga, karena justru demokrasi ini sudah ada. Jadi orang yang tidak harus dilayani secara adat, sekarang bisa, apalagi dia punya jabatan. Kalau dulu kerajaan kan mungkin anak-anak raja itu yang diperadat. Sekarang ini kan tidak, siapapun dia kalau dia memang ditugaskan, apalagi kalau seperti posisi camat. Camat, kalau sekarang kan relatif sama dengan SKPD, dia bukan dipilih oleh rakyat camat, bukan diangkat dari bawah, tapi dia penunjukkan atasan kan? Jadi sekalipun dia bukan turunan raja kalau dia dapat perintah, melaksanakan itu. Karena dulu, belum ada undang-undang yang membatasi itu.²⁷

Selain adat, partai politik juga ambil bagian dalam mengenalkan individu pada masyarakat. Berbeda dengan adat yang mengenalkan elite dengan tujuan memberikan kesadaran akan posisi seseorang dalam masyarakat, partai politik memiliki tujuan yang sebenarnya agak 'pragmatis'. Partai politik memperkenalkan 'orangnya' dengan tujuan memperoleh dukungan politik dari masyarakat untuk memperoleh kekuasaan yang diidamkan. Instrumen yang paling umum digunakan biasanya adalah baliho dan kegiatan-kegiatan yang memberikan ruang aktualisasi bagi individu. Dan pada zaman yang sedemikian ruwet ini, cara-cara yang demikian dianggap paling efektif.

6. Dilema pemekaran wilayah Suwawa: perspektif elite

Jatuhnya Orde Baru yang sentralistik telah menjadi 'kado spesial' bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah di luar Jawa. Reformasi dirayakan dengan berlomba-lomba memandirikan suatu daerah dengan pertimbangan yang beragam. Namun tetap isu utama yang dimainkan adalah aspirasi rakyat yang menginginkan efektifitas pembangunan. Peran elite lokal juga tak dapat diabaikan dalam setiap pemekaran daerah. Nasib daerah seringkali bergantung pada ritme yang dimain-

²⁷ Dituturkan oleh Harmain Mansur melalui wawancara pada 10 April 2013.

kan para elite. Tidak mungkin pula mengabaikan elite sebagai manusia biasa yang tentu selalu memiliki pertimbangan pragmatis dalam setiap aktifitasnya—apalagi pada sisi politis pemekaran.

Tahun 2007, merupakan awal munculnya suhu pemekaran daerah di Suwawa. Hingga saat ini, secara berurutan Suwawa telah menjadi 5 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Suwawa, Suwawa Selatan, Suwawa Timur, Suwawa Tengah dan Pinogu. Pertimbangan kelayakan yang paling utama adalah geografis Suwawa masih sangat luas dan beberapa wilayah berada pada area yang sulit di jangkau—misalnya Pinogu dan sekitarnya. Timbullah inisiatif pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk memekarkan Suwawa menjadi beberapa kecamatan.

Masyarakat umumnya menyambut baik visi tersebut, apalagi mereka yang secara geografis berjauhan dengan desa Boludawa (ibu kota Kecamatan Suwawa sebelum pemekaran). Namun tidak demikian dengan pemahaman sebagian elite lokal Suwawa khususnya mereka yang tidak terlibat dalam pemerintahan (oponenn). Rusli mengatakan bahwa:

Sebetulnya ada ketidaksetujuan itu, ada kemarahan dari elite lokal. Karena mereka merasa bahwa Suwawa sebagai daerah *Tiyombu* dipecah-pecahkan. Tapi kemudian kan ini sekarang ada sebagian masyarakat menilai bahwa yang dibutuhkan sekarang lagi bukan soal komitmen kedaerahan, tetapi mampu tidak daerah ini mensejahterahkan rakyat? Kalau kemudian memecah-mecah itu adalah bagian daripada upaya untuk mensejahterahkan mengapa tidak? Misalnya untuk pendekatan pelayanan, orang Pinogu sudah dibuat kecamatan sendiri. Karena dia mengurus KTP

harus turun kebawah, hanya KTP 20.000, untuk bolak-balik 1.200.000, kesini 600.000, kesana 600.000. Kan ini sebuah ironi.²⁸

Bagi sebagian kalangan elite Suwawa dan kalangan yang tertarik dengan politik, visi pemekaran yang diusung pemerintah kabupaten secara normatif cukup rasional. Apalagi dengan alasan mendekatkan pelayanan dan memfokuskan pembangunan agar lebih optimal. Tetapi hal tersebut juga diiringi dengan misi politis untuk memecah dukungan politik dan memperkuat kontrol terhadap tiap-tiap kecamatan. Menurut Jumadi pemekaran yang dilakukan di Suwawa tujuannya yakni:

Itu tujuannya untuk kepentingan menjaring, berkaitan dengan politik itu. Artinya sasarannya itu memang benar, secara konkretnya itu benar bahwa untuk memperpendek rentan pengembangan. Tapi sebenarnya bukan, maksudnya bukan seperti itu. Artinya disitu “ke-Aku-an” timbul, “*wanu ja wa’u ja lali camat teeye, wanu ja wa’u ja lali kambungu utiye*” (“kalau bukan aku, [kamu] tidak jadi camat disini. Kalau bukan aku, disini tidak menjadi kecamatan). “Sehingga kamu harus dukung saya”. Imbalannya seperti itu.²⁹

Pemerintah Kabupaten pada periode pertama Bone Bolango dianggap berusaha membangun simbiosis secara politik dengan wilayah yang dimekarkan. Hal tersebut dianggap merupakan salah satu opsi guna mempermulus langkah politik pada Pilkada 2009. Sebagai Bupati Bone Bolango, Hamim juga mengakui bahwa pemekaran yang terjadi pada masa pemerintahan Ismet-Kilat (2004-2009) cenderung ambivalen. Menurutnya:

Pemekaran ini kan enam tahun terakhir? Motivasinya ya untuk pelayanan. Mendekatkan pelayanan pada masyarakat, mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat, menciptakan efisiensi. Dulu kalau untuk urus sesuatu

²⁸ Dituturkan oleh Rusliyanto Monoarfa melalui wawancara pada 16 April 2013.

²⁹ Dituturkan oleh Jumadi Botutihe melalui wawancara pada 15 April 2013.

harus ke Bube atau Boludawa yang jauh, maka orang-orang dari Pinogu atau orang dari Dumbaya Bulan, dari Tulabolo, cukup datang ke kecamatan baru itu (kantor camat baru) untuk dilayani. Dasar hukum penetaannya ya ada Perda. Tapi yang lain juga, secara politis ini kepentingan daerah juga kan? Walaupun mendekatkan pelayanan, tapi mungkin juga untuk memperkuat kontrol. Lalu yang kedua juga karena melihat luas dan sulitnya medan di Bone Bolango.³⁰

Dikonfirmasi mengenai pemekaran wilayah Suwawa pada tahun 2007, Wakil Bupati pada waktu itu—Moh. Kilat Wartabone—menganggap hal tersebut merupakan usaha membangun wilayah secara efisien. Kilat justru mengkritisi beberapa pemekaran yang terjadi pada periode pemerintahan saat ini (Abdul Haris Nadjamudin-Hamim Pou). Menurutnya:

Yang pertama, kita euforia karena sudah jadi kabupaten. Karena euforia karena sudah jadi kabupaten dan pada waktu itu kita masi empat kecamatan, masih Bone Pantai, Suwawa, Kabila, Tapa. Nah, sementara ada aspirasi masyarakat, bahkan keinginan juga pemerintah pusat, bahwa sebaiknya satu kabupaten itu adalah 10 kecamatan. Jadi ini kita coba-coba, kita sesuaikan dengan aspirasi, dan juga pada waktu itu anggaran DAU itu basisnya juga kecamatan. Nah, lebih banyak kecamatan, lebih banyak DAU-nya kan?

Cuma ada juga pemekaran yang sudah menyusul ini, lebih dominan politisnya. Kalau 10 kecamatan itu yang paling ideal sebetulnya. Cuma yang sudah belakangan sudah jadi 17 ini, sudah unsur politik.³¹

Yang terpenting bahwa misi pemekaran yang dianggap bermuatan politik ternyata mengalami ‘gagal panen’ pada Pilkada 2009. Baik Ismet Mile maupun Moh. Kilat Wartabone—yang ketika itu mencalonkan diri pada ‘bilik’ yang berbeda—gagal memperoleh suara terbanyak. Ini merupakan tanda bahwa dalam perspektif geopolitik, Suwawa yang kini menjadi 5 kecamatan tidak mudah mengalami fragmentasi sosial dengan adanya wilayah administratif.

³⁰ Dituturkan oleh Hamim Pou melalui wawancara pada 26 April 2013.

³¹ Dituturkan oleh Moh. Kilat Wartabone melalui wawancara pada 29 April 2013

Pemekaran wilayah Suwawa yang kontroversial juga mengindikasikan bahwa dalam konteks sosial-politik Kabupaten Bone Bolango, terdapat dua kutub *geografic power* yang begitu berpengaruh. Kutub pertama yakni Suwawa (Bone), sedangkan kutub lainnya adalah Bolango. Keduanya dari sisi karakter masyarakatnya dianggap memiliki perbedaan. Hamim dan Sugondo mempersonifikasikan masyarakat Suwawa (Bone) dengan karakter yang ‘maskulin’, sedangkan masyarakat Bolango dipandang memiliki karakter yang agak ‘feminim’.³²

Antara Suwawa (Bone) dan Bolango kiranya bisa disebut sebagai “*shadow state*” dalam dinamika perkembangan Kabupaten Bone Bolango. Betapa tidak, kedua kutub tersebut seringkali menunjukkan sikap magnetis yang jika bukan tarik-menarik maka tolak-menolak. Sehingga, kontestasi politik di Kabupaten Bone Bolango juga banyak mempertimbangkan kehadiran keduanya sebagai indikator penentu.

B. Pembahasan

1. Pembentukan elite di Suwawa

Tidak ada yang dapat memungkiri bahwa hingga saat ini di Suwawa begitu ‘eksotis’ dengan marga-marga tertentu. Secara empiris hal ini akan begitu mudah disaksikan pada setiap nama yang ada di baliho-baliho menjelang ‘ritual’ pemilihan eksekutif maupun legislatif Kabupaten Bone Bolango bahkan Provinsi Gorontalo. Asumsi yang kemudian terbangun di mata masyarakat pada umumnya,

³² Dituturkan melalui wawancara oleh Hamim Pou pada 26 April 2013 dan Sugondo Makmur pada 11 April 2013.

bahwa di Suwawa terdapat *local strongmen* yang dikapling oleh marga-marga besar lokal (selanjutnya disebut elite lama). Bahkan menurut Aldes, status sosial di Suwawa lebih cenderung dilihat pada *rating* setiap marga. Persoalan pendidikan dan ekonomi hanyalah sebagai penunjang.³³

Tentu mengemukakan elite bermarga tertentu (elite lama) tidak mungkin lahir begitu saja. Faktor dominan yang berpengaruh adalah peristiwa-peristiwa konstruktif yang pernah terjadi dalam sejarah Suwawa. Sejarah telah menjadi peletak dasar konstruksi sosial kehidupan masyarakat Suwawa di masa kini—bisa jadi juga di masa mendatang. Pembentukan elite lama Suwawa lebih banyak disuplai oleh faktor kesejarahan yang kemudian dipertegas di era kekinian. Paling tidak terdapat dua faktor yang saling terkait yang menyebabkan Suwawa begitu kental dengan ketenaran marga-marga tertentu. Pertama, warisan nuansa kerajaan; dan kedua, peristiwa ‘kolonialisme vs heroisme’.

Jika dalam sistem pemerintahan Yogyakarta diperintah oleh satu nama yakni Sultan Hamengku Buwono, maka berbeda dengan sistem pemerintahan di Kerajaan Suwawa beberapa abad silam. Raja-raja di Kerajaan Suwawa waktu itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor kedinastian. Hampir tidak ada yang namanya aksioma ‘putra mahkota’ dalam penentuan raja kala itu. Raja dipilih secara demokratis berdasarkan musyawarah dan seleksi yang ketat oleh orang-orang bijak yang ada di Suwawa waktu itu. Menurut Sugondo Makmur:

³³ Diturunkan oleh Moh. Aldes Ilahude melalui wawancara pada 24 April 2013.

Sistem pemerintahan Kerajaan Suwawa itu sebenarnya sudah mengaplikasikan demokrasi. Jadi kepemimpinan di Suwawa itu bukan dikarenakan *nanti* (memiliki) karena ada turunan, tidak. Tetapi dilihat dari tiga hal. Yang pertama, misalnya dia punya keberanian (*buheli*). Jadi dia kalau berani, maka oleh masyarakat disepakati diangkat menjadi raja. Atau karena keilmuannya, kompetensi. Atau karena keimanannya, maksudnya keagamaan, ilmu agamanya. Jadi dilihat dari tiga hal itu, perilaku, ada dari kompetensi dan ada dari karena berani.³⁴

Pertimbangan ‘darah biru’ tidak begitu penting dalam menentukan seorang pemimpin di Kerajaan Suwawa. Hal tersebut dikarenakan oleh hubungan kekeluargaan masyarakatnya yang telah terpupuk sejak lama. Semua orang Suwawa dianggap merupakan kesatuan kekeluargaan (*Towawa’a*) akibat tradisi kawin-mawin *Pidodotiya*. Secara umum, ‘seisi’ Suwawa hingga saat ini merupakan suatu *link* keluarga. Sehingga secara *de facto*, ketentuan umum menjadi seorang raja/pemimpin di Suwawa, cukup merupakan warga asli Suwawa (*Pidodotiya*). Inilah yang kemudian membuat nama-nama raja di Suwawa menjadi beragam, namun masih memiliki ikatan keluarga yang sangat erat. Bahkan bisa disebut semua orang di Suwawa merupakan ‘bangsawan’, walaupun di kemudian hari hal tersebut menjadi ironi.

Sinkronisasi era kerajaan terhadap kehadiran elite lama Suwawa lebih banyak berwujud respek atas sumbangsi para raja kepada negeri khususnya masyarakat. Bahkan hampir semua raja Suwawa memiliki apa yang disebut dengan *Ilomata* (hasil karya), yang kemudian telah menjadi kriteria dalam menilai elite dalam masyarakat.³⁵ Raja Arus Bone (Wartabone) dan Raja Tangahu misalnya, generasi terakhir raja Suwawa tersebut berkontribusi besar dalam menentang

³⁴ Dituturkan oleh Sugondo Makmur melalui wawancara pada 11 April 2013.

³⁵ Dituturkan oleh Renald Komendangi melalui wawancara pada 1 April 2013.

sistem yang diberlakukan Belanda seperti penyetoran upeti dan eksploitasi sumber daya alam. Kiprah para raja tersebut kemudian memperoleh respek yang begitu besar dari masyarakat, respek tersebut yang kemudian mengalir secara spontan kepada keturunannya. Terlebih lagi bila 'sang keturunan' memiliki kriteria umum pemimpin Suwawa seperti keberanian, karakter yang keras dan akhlak yang mulia. Selain itu, keadaan yang demikian juga dilanggengkan oleh adat sebagai media ortodoks elite. Adat di Suwawa dalam beberapa tahun silam tidak sembarangan apabila hendak melakukan prosesi adat (*mo adati*) kepada orang-orang ataupun golongan-golongan tertentu. *mo adati* atau *mo po hutu* oleh kalangan adat hanya bisa dilakukan kepada kalangan tertentu yang dianggap merupakan 'keturunan bangsawan/ raja'. Begitulah elitisme konvensional Suwawa dikonstruksi secara turun temurun.

Memasuki era kolonialisme, elite lama semakin jelas kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Namun kali ini sutradaranya adalah '*ti Langgayi*' (sebutan orang Suwawa terhadap koloni Belanda). Para koloni yang jumlahnya sangat sedikit ketimbang masyarakat wilayah jajahan kemudian melakukan strategi eksploitasi sumber daya lokal melalui politik adu domba yang diorientasikan pada disintegrasi lokal. Hal tersebut dilakukan melalui rekrutmen raja maupun keturunan-keturunannya untuk menduduki posisi-posisi sentral di pemerintahan Belanda. Sugondo Makmur bahkan melihat elitisme menguat karena kehadiran Belanda. menurutnya:

Elitisme Suwawa ini sebenarnya terbangun ketika kolonialisme. Jadi, sebenarnya Suwawa ini kan dari satu rumpun, "*Pohala'a*" namanya. Jadi pada satu *pohalaa Tuwawa* itu, kolonialisme itu menggunakan "*Devided*

Impera”, jadi dia memecah-mecah itu. Contohnya, misalnya kita lihat saja pada angkatan di atasnya, yakni Pak Nani. Jadi Pak Nani Wartabone itu, dia menentang Belanda. Tetapi ada kakaknya justru *Jogugu* Belanda. Jadi sengaja unsur di keluarga-keluarga itu dipisah-pisahkan. Jadi politik adu domba itu yang dimainkan oleh Belanda, yang akibatnya terjadi kelompok-kelompok masyarakat tadi, marga-marga tadi besar. Kemudian diberi posisi dsb. Muncullah itu misalnya yang paling menguat ini kan Tangahu, Wartabone, Mooduto. Padahal kalau dilihat dari satu turunannya, mereka memang saudara. Jadi kelompok itu sangat kuat juga. Menguatnya itu karena seolah-olah bahwa ini merupakan bagian dari sistem misalnya darah biru dsb.³⁶

Belanda menciptakan margin yang sangat besar antara masyarakat dengan para pemerintah kala itu. Dengan menanamkan ‘benih-benih’ status sosial berdasarkan keturunan, Belanda mencoba menciptakan status sosial yang berbeda secara signifikan antara pemerintah dan rakyat.

Di luar dugaan, gerakan separatis lokal menentang kehadiran Belanda juga mempertegas status para elite lama Suwawa. Para inisiator serta orang-orang yang terlibat aktif dalam mengusir Belanda, notabeneanya merupakan elite produk kerajaan yang terbagi dalam dua kelompok, yakni golongan formal dan non formal ketika perintahan Belanda. Kulminasinya dapat disaksikan pada kehadiran Nani Wartabone sebagai aktor sentral pada perjuangan kemerdekaan Gorontalo yang mencapai puncaknya pada 23 Januari 1942. Nani Wartabone tidak hanya menjadi simbol perjuangan Gorontalo—khususnya masyarakat Suwawa, tetapi juga sebagai simbol kejayaan elite lama. Inilah yang disebut Cornelis Lay bahwa di negara/ wilayah baru, peran seseorang dalam perjuangan yang sakral, membuka ruang bagi dirinya untuk berada di lingkungan elite (khususnya elite politik)

³⁶ Dituturkan oleh Sugondo Makmur melalui wawancara pada 11 April 2013.

dalam masyarakat tersebut.³⁷ Terbukti, pasca era Nani Wartabone mulai nampak klan Wartabone yang sangat dihargai, sehingga mereka banyak memasuki area pemerintahan.

Pasca Belanda ‘pulang kampung’, elite lama Suwawa dengan marga-marga tertentu meneruskan ‘tradisi ke-elitan’ yang ditinggalkan Belanda. Mereka menyebar dan menduduki jabatan-jabatan formal maupun non formal yang ada di Suwawa—bahkan di Gorontalo. Hal ini juga yang kemudian secara kontinu membuat mereka (elite lama) kokoh menjadi elite lokal di Suwawa. Bahkan seperti pada *statement* awal tulisan ini, para elite lokal Suwawa secara masif tampil sebagai pemimpin-pemimpin Gorontalo—terutama pada era Orde Baru dan pra Reformasi, serta ada pula yang sempat jaya pada tataran nasional.

Saat ini, Suwawa telah memasuki era modern yang banyak ditandai dengan peningkatan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemajuan teknologi sangat mempertimbangkan kompetensi bagi mereka yang ingin ‘berpartisipasi’ dengan zaman yang ada. Kaitannya dengan elitisme di Suwawa, menurut Rusli:

... Saya juga tidak ingin kemudian menafikan bahwa kultur teknologi kemudian meluluhkan segalanya. Ketika sebelum masuknya fase penjajahan, kemudian pra penjajahan, kemudian fase penjajahan dan pasca penjajahan, jadi situasi turut menentukan. Saya juga ingin mengatakan bahwa kultur ini kemudian berubah karena adanya teknologi, kalau tidak ada teknologi, mungkin budaya-budaya atau fase-fase yang berlaku pada saat itu mungkin akan berlaku seterusnya. Tapi kemudian lahirnya generasi berikutnya yang kemudian tidak mau mengikuti fase itu karena ada fase

³⁷ Cornelis Lay, “Rekrutmen Elit Politik”. *Prisma* (Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial), no. 4, tahun 1997, penerbit LP3ES, hlm. 22.

teknologi, sehingga kemudian terjadilah akulturasi yang ada di Suwawa itu sendiri.³⁸

Kehidupan masyarakat Suwawa yang dulunya cenderung primordial kini mulai fleksibel dan adaptatif terhadap zaman. Sehingga legitimasi masyarakat tidak hanya berpusat pada harmoni masa lalu semata. Perkembangan yang demikian menurut Alim S. Niode telah memicu adanya aktifitas baru dalam perhelatan legitimasi di Suwawa. Menurut Alim:

... Dia mulai mengarah kepada pencarian status baru dengan basis-basis yang relevan. Nah basis-basis yang relevan itu yang berkembang memang selain pendidikan, basis politik, basis ekonomi. Kalau mau lihat seberapa distribusi elite itu di Suwawa, tidak bisa hanya satu basis, mereka mendistribusikan diri pada basis-basis yang relevan dan kemudian melakukan peremajaan.³⁹

Pada masa transisi ini, menurut Alex Koniyo, status elite seseorang di Suwawa tidak hanya dilihat dari marganya saja, pendidikan juga sangat penting dalam melegitimasi seseorang menjadi elite. Lebih jelas, Alex mengemukakan beberapa indikasi mengenai elite Suwawa saat ini sbb.

Indikasinya, kerajaan atau turunan. Baru dilihat dari itu, profilnya sehari-hari. Dia bisa diidolakan sebagai seorang pimpinan atau seorang tokoh dalam masyarakat, kepribadian, akhlak dsb. Terus yang ketiga, paling tidak dia diatas sedikit rata-rata dari semua, dari kualitasnya, dari pendidikannya dari kekayaannya, misalnya hartanya, dan caranya berkata kepada orang banyak bagaimana. Itu yang jadi dasar bahwa semua yang akan jadi elite lokal adalah orang-orang yang dianggap bisa tempat bertanya orang, bisa sebagai tempat mencurahkan persoalannya.⁴⁰

³⁸ Dituturkan oleh Rusliyanto Monoarfa melalui wawancara pada 16 April 2013.

³⁹ Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 10 April 2013.

⁴⁰ Dituturkan oleh Alex Koniyo melalui wawancara pada 27 Maret 2013.

Dinamika inilah yang kemudian telah memicu perubahan komposisi masyarakat khususnya para elite di Suwawa. Kebutuhan masyarakat yang beragam juga dibarengi dengan sumber daya elite yang kian bervariasi. Ruang-ruang aktualisasi dan legitimasi yang bervariasi kemudian memunculkan aktor baru (elite baru) dalam setiap bidangnya. Walhasil, Suwawa saat ini tidak lagi ortodoks dalam segi kategori elite. Safri menggambarkan bahwa saat ini Suwawa mengalami dualisme pemaknaan terhadap elite.

... Dengan kemajuan zaman, (monopoli pertimbangan keturunan) mulai terkikis. Kalau sekarang sudah hampir berimbang. ... Apalagi dengan jadinya provinsi, jadi kabupaten, sudah mulai bergeser. Jadi siapa yang pintar, atau mungkin punya pendidikan. Jadi di Suwawa masih ada tokoh yang dilihat dari keturunannya, dari karena pendidikannya juga sekarang. Punya kemampuan intelektual, sekarang sudah banyak tokoh-tokoh/ elite-elite yang muncul karena itu, walaupun dari orang luar.

Artinya dia mulai bergeser sekarang. Tapi masih ada itu sistem-sistem masyarakat tradisional. Bahkan masyarakat-masyarakat kalangan menengah, masih agak segan dengan tokoh-tokoh kharismaik, masih mentokohkan.⁴¹

2. Kokohnya elite lama

Ditengah kemajuan zaman yang semakin sulit terhindarkan, juga telah menimbulkan ancaman terhadap goyahnya posisi ke-elitan seseorang ataupun golongan tertentu dalam masyarakat. Semakin luasnya arena dan potensi adanya perubahan pola pikir masyarakat adalah ancaman yang serius terhadap elite. Perubahan yang terjadi di Suwawa membuat elite lama senantiasa diperhadapkan pada situasi bermunculannya elite baru. Namun, kedatangan elite baru tidak sepenuhnya mampu merobek 'jaring legitimasi' elite lama yang telah dirajut dan

⁴¹ Dituturkan oleh Safri Puili melalui wawancara pada 9 April 2013.

digunakan sekian lama. Elite lama tetap masih menunjukkan perannya dalam masyarakat walaupun harus ‘bermawas diri’ dengan hadirnya elite baru. Asumsi ini kemudian dibenturkan dengan pertanyaan: bagaimana hingga elite lama dengan marga-marga khas tersebut bisa bertahan hingga kini? Apalagi saat ini konteks sosial-politik masyarakat Provinsi Gorontalo agak ‘nihil’ dengan hal yang demikian. Begitu juga bila melihat komposisi elite Suwawa yang saat ini juga mulai memunculkan elite baru.

Elite lama sejak awal banyak merajai sendi-sendi sosial sebagai aktor utama. Dari masa ke masa, level formal maupun non formal tidak luput dari hadirnya elite bermarga ‘hebat’. Mereka banyak menguasai modal-modal sosial yang potensial mengukuhkan status ke-elite. Aktivitas kekuasaan mereka yang tersebar semakin memperkuat asumsi bahwa mereka memiliki kriteria bawaan sebagai pemimpin di Suwawa. Mereka sejak awal seakan-akan sudah terlatih untuk menjadi inisiator dalam setiap pergerakan masyarakat. apalagi hal tersebut juga didukung oleh munculnya *stereotip* bahwa secara psikologis elite Suwawa adalah mereka yang merepresentasikan secara nyata karakter orang Suwawa: berani, herois dan juga mampu mengayomi masyarakat layaknya elite-elite terdahulu. Sehingga, Alim mengatakan bahwa:

.... Walaupun mereka berada pada sektor pendidikan, mereka memiliki bekal kepemimpinan yang kuat, karena dilahirkan dan dibesarkan di dalam tradisi kekuasaan, tradisi kerajaan.

Mengakar itu, para elite di Suwawa apakah dia formal-non formal, apakah dia disektor pendidikan, disektor mana saja, mereka lahir dan besar di dalam lingkungan kekuasaan, sehingga mereka terampil dan terlatih untuk itu. Pada saat-saat itu dibutuhkan apakah mereka fokusnya di pendidikan,

di pengusaha, mereka bisa untuk diorbit jadi pemimpin dan mereka memiliki karakter sebagai pemimpin.⁴²

Hamim Pou juga meyakini adanya pewarisan karakter yang dimiliki oleh elite lama. Menurutnya:

Keturunan, nama besar itu kan masih dominan. Karena masyarakat mengenang kan? “Ini titisannya si ini” dan dihormati dan dihargai. Dan mereka keturunan itu juga mewarisi kharisma kakeknya, buyutnya kan? Walaupun tidak sangat *pure full*. Tapi dia masih ada 20-30% dari pengaruh ketokohan kakeknya yang menurun pada anak cucunya.⁴³

Jika beberapa dekade sebelumnya elite lama secara *pure* lebih berorientasi ke marga, saat ini kebanyakan elite lama selain memiliki status keturunan dari *icon* tertentu, juga memiliki penguatan basis elite yang bisa dikatakan relevan dengan zaman modern. Elite lama perlahan mulai sadar akan pentingnya *branding-branding* baru yang harus dimiliki guna menjaga statusnya sebagai elite. Revitalisasi yang paling dominan menurut Alim dilakukan pada aspek pendidikan. Ini merupakan terobosan yang tidak sulit bagi elite lama, karena selain memiliki kekuasaan, mereka juga secara ekonomi berada pada tataran menengah keatas. Sehingga mereka memiliki kesempatan yang besar dalam merintis status pendidikannya hingga tingkat kesarjanaan. Alim mengatakan bahwa banyak diantara marga-marga besar Suwawa menempuh pendidikan di luar daerah. Namun Alim juga mengungkapkan bahwa revitalisasi basis pendidikan bagi sebagian kalangan elite lama dimulai agak terlambat. Berikut ini pendapat Alim mengenai persoalan tersebut.

⁴² Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 19 Maret April 2013.

⁴³ Dituturkan oleh Hamim Pou melalui wawancara pada 26 April 2013.

Karena mereka nenek moyangnya dulu telah merintis posisi-posisi elite, walaupun itu tidak diturunkan, tapi secara sosial-ekonomi, mereka lebih mengemuka atau berkesempatan di dalam mempertahankan itu. misalnya seorang A yang petani karena sibuk dengan urusannya mengolah tanah, maka dia tidak bersentuhan dengan misalnya bagaimana misalnya peradatan dsb. Dan itu kemudian lestari pada level siapa yang mewarisi itu. Apalagi kemudian kalau itu ditambah dengan pendidikan (konsep Robert Van Niel). Kalau sudah di *back up* dengan pendidikan, maka justifikasi dari pada elite itu makin kuat.

Mungkin karena lebih merasa memiliki status, lebih merasa ada status yang lebih besar daripada yang lain, sehingga dalam waktu yang panjang, tahun-tahun kemarin, status itu menjadi sesuatu yang dipentingkan dan kemudian setelah berubah pendidikan akan mempengaruhi status, nah disitu agak lambat dia berubah. Sehingga ada beberapa elite itu yang kemudian dibaca secara rata-rata dia agak telat membenahi soal pendidikan⁴⁴

Saat ini, ditengah masyarakat Suwawa mereka (elite lama) tidak hanya bermodalkan status sosial masa lalu (marga). Mereka semakin kokoh dengan atribut dan reputasi sebagai ‘orang berpendidikan’ yang dianggap pantas untuk menduduki posisi-posisi penting khususnya di birokrasi. Mereka seolah-olah mulai menunjukkan gerak yang transformatif demi menjaga eksistensi dalam dinamika masyarakat.

Faktor lainnya yang juga berkontribusi dalam memelihara status ke-elitan elite lama, juga ditentukan oleh sosio-kultural Suwawa itu sendiri. Suwawa yang notabenenya merupakan suatu kelompok yang homogen masih menyisakan ‘gumpalan-gumpalan’ primordialisme masa lalu akan ketokohan lokal. Sulit menghapus ingatan masyarakat mengenai raja-raja yang pernah memerintah di Suwawa, aktor-aktor perjuangan kemerdekaan Gorontalo dan para birokrat-birokrat Suwawa yang sangat berpengaruh di Gorontalo—ketika masih me-

⁴⁴ Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 19 Maret 2013 dan 10 April 2013.

rupakan bagian dari Profinsi Sulawesi Utara kala itu. Namun itu mulai berpadu dengan pertimbangan pendidikan yang dimiliki oleh setiap elite di Suwawa.

... Kalau di kalangan politisi ada beberapa cucu-cucu mantan pejuang itu sekarang sudah menjadi anggota DPR, ada di pemerintah daerah, cucu-cucu mantan pejuang. Karena mereka sepertinya memberdayakan diri dengan melakukan peningkatan SDMnya, ada yang sekolah S2, S3, bahkan ada yang bisa jadi pejabat di luar daerah.⁴⁵

Dari paradigma para elite lama sendiri, Sugondo mengungkapkan adanya hubungan timbal balik antara tingkat pendidikan dengan cara memandang status elite di Suwawa. Menurutnya:

Nah, elitis itu pada diri masing-masing pemuda Suwawa itu akan menghilang ketika sekolahnya tinggi. Dia tidak lagi merasa “o saya ini turunannya Pak Nani”, tetapi dia lebih mengedepankan kecerdasannya. Bahwa dia mampu karena kemampuannya, bukan karena misalnya saya adalah cucu dari pejuang.

3. Elite baru

Masyarakat dipelosok dunia manapun senantiasa akan mengalami apa yang disebut dengan perubahan. Hanya saja waktu datangnya ‘kereta perubahan’ tersebut berbeda-beda setiap wilayah, bahkan laju kereta perubahan yang ditumpangi pun beragam. Ada kereta yang datang dengan cepat yang tentu saja memiliki kecepatan yang diatas rata-rata. Begitulah adanya, kelompok masyarakat layaknya segerombolan orang yang menunggu kereta di stasiun yang berbeda-beda.

⁴⁵ Diturunkan oleh Rusliyanto Monoarfa melalui wawancara pada 16 April 2013.

Perubahan sosial yang terjadi di Suwawa secara nyata ikut merangsang terbukanya ruang-ruang publik yang syarat akan kriteria tertentu. Kriteria yang paling umum adalah kompetensi dan kecakapan. Modernisasi bidang-bidang sosial juga menyediakan ruang yang lebih terbuka bagi mereka yang berke-terampilan, yang diakui secara formal. Hal ini tentu disadari betul oleh elite lokal di Suwawa, walaupun kesadaran ini sebenarnya barulah secara umum terjadi pada kurang dari satu dasawarsa terakhir—pasca dibentuknya Kabupaten Bone Bolango.

Akan tetapi yang paling penting sebagai tonggak lahirnya elite baru dari luar maupun dari dalam Suwawa adalah terbukanya akses ke pendidikan. Modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi juga memicu lahirnya elite baru di Suwawa. Masyarakat mulai mempertimbangkan kelayakan kompetensi yang dimiliki setiap elite ketimbang atribut marga yang dimilikinya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketokohan yang ada saat ini tidak se-fantastis ketokohan sebelumnya ketika elite-elite Suwawa sangat berpengaruh di tingkat Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulut hingga nasional. Kompas legitimasi masyarakatpun secara spontan mulai mengalami transisi yang signifikan.

Legitimasi masyarakat Suwawa saat ini sangatlah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Apalagi pasca hebohnya tambang rakyat di Suwawa yang berhasil mengorbitkan nama-nama baru dengan kilauan kekayaan yang dimilikinya—walaupun masih di *back up* oleh mereka yang bermarga ‘fenomenal’. Berikut ini penjelasan Harmain Mansur terkait dengan pergeseran legitimasi masyarakat Suwawa.

Karena sudah banyak yang mengimbangi. Kalau dulu memang di Suwawa orang-orang itu punya 'kekuatan', tapi sekarang kan sudah tidak lagi. Sekarang kan orang melihat bukan karena kebangsawanannya, orang melihat kalau ada uangnya. *Dorang* itu penambang-penambang, penambang-penambang itu orang yang di bawah kan? Tetapi kalau *anu dorang*, justru orang pembesar-pembesar yang menghargai mereka.

... Jadi sudah itu yang saya katakan, manakala dia punya uang, dia bisa melakukan apa. Entah secara adat, apa saja bisa dia lakukan, karena dia punya keuangan. Itu yang saya katakan, sudah susah, tidak seperti dulu itu. Sehingga orang berpikir "eh... *ngana tidak bisa lagi beken bagitu*", bukan sistem kerajaan lagi ini.⁴⁶

Pada masa-masa adaptasi elite lama, secara efektif dimanfaatkan oleh elite-elite baru untuk memprospek pendidikan mereka. Mereka adalah beberapa orang dari luar Suwawa dan kebanyakan lainnya adalah orang— asli—Suwawa. Elite baru biasanya mengandalkan tingkat pendidikan yang memadai dan ekonomi yang mendukung. Seperti yang diakui Hamim bahwa:

Saya kira mulai muncul elite-elite baru, pertama dengan tingkat pendidikan yang sudah mulai baik dan ekonomi yang lebih baik. Pertambahan misalnya, kan memunculkan orang kaya baru yang juga ikut masuk ke partai politik. Tapi pilihan politik mereka beragam, ada yang di Golkar, PDI-P, ada di Gerindra, ada di PAN, di Hanura, PPP dan partai-partai lain. Sekarang kampanye elite-elite lama harus bertarung juga munculnya generasi baru yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam dunia politik.⁴⁷

Apalagi pada saat Kabupaten Bone Bolango terbentuk, dalam rekrutmen pejabat pemerintahan daerah lebih menekankan pada aspek pendidikan. Mereka yang telah memiliki pendidikan kemudian terserap dan memperoleh jabatan dalam pemerintahan. Antara pendidikan dan jabatan menjadi kolaborasi yang padu dan lebih modernis dalam membentuk legitimasi masyarakat seperti yang

⁴⁶ Dituturkan oleh Harmain Mansur melalui wawancara pada 10 April 2013.

⁴⁷ Dituturkan oleh Hamim Pou melalui wawancara pada 26 April 2013.

diakui Udin.⁴⁸ Alim juga menegaskan bahwa status elite baru “biasa itu diperoleh melalui pendidikan, dan memang sudah pasti. Tapi juga mereka sebagian yang lain memasuki lembaga-lembaga pemerintahan legislatif atau eksekutif”.⁴⁹

Faktor lainnya juga yang menentukan munculnya elite baru di Suwawa adalah ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih, tentu sangat potensial melakukan apa saja, termasuk memperoleh status secara politik. Fenomena yang mulai menggapung di masyarakat Suwawa sekarang adalah munculnya kalangan penambang sukses yang kemudian memasuki dunia pemerintahan. Seperti yang dikatakan Karim “dan kalau yang sekarang, elitisme yang sekarang itu orang-orang yang sudah memerintah, keluarga pemerintah, ekonominya sudah mapan. Kan sudah Elitisme ini, orang-orang tambang sudah elitisme sekarang”.⁵⁰

Para elite dengan *background* pendidikan dan ekonomi ini kemudian mulai merasuk ke jaringan birokrasi melalui partai politik. Partai politik yang orientasinya memonopoli dukungan massa, tak menyia-nyiakan hal tersebut.

Kehadiran elite baru yang bukan berasal dari internal Suwawa juga sulit diabaikan. Karena masyarakat Suwawa memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat tinggi, maka elite barupun biasanya merupakan produk perkawinan dengan orang Suwawa setempat. Mereka kemudian sudah dianggap sebagai bagian dari *link* keluarga Suwawa. Elite baru yang berasal dari luar Suwawa juga harus menjunjung

⁴⁸ Dituturkan oleh Udin Maksum melalui wawancara pada 3 Maret 2013.

⁴⁹ Dituturkan oleh Alim S. Niode melalui wawancara pada 19 Maret 2013

⁵⁰ Dituturkan oleh Abdul Karim Sidiki melalui wawancara pada 17 April 2013.

tinggi semangat kekeluargaan masyarakat Suwawa. Seperti yang dikatakan Aldes bahwa:

Ya memang faktor perkembangan yang ada sekarang ini. Misalnya hubungan horizontal, ada orang yang nikah disana orang luar. Ini yang merubah, yang ada sekarang itu. Misalnya ada orang luar mau nikah disana, kemudian orang yang dinikahi itu adalah orang yang dikatakan elite disana. Faktor pendidikan juga menentukan. Ekonomi juga cukup menentukan, tetapi dilihat apakah orang yang ekonominya berkembang ini ada kepedulian *nda'*? Nah, kalau kita tidak ada kepedulian, jangan pernah mimpi. Dia mau membantu orang, mau membantu kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau kita menutup mata disitu, jangan pernah mimpi jadi elite disana.⁵¹

⁵¹ Diturunkan oleh Moh. Aldes Ilahude melalui wawancara pada 24 April 2013.